



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 01, Bulan Juni Tahun 2025

Jurnal Ilmiah Koordinasi

Dikirim penulis:15-06-2025, Diterima: 29-06-2025 Dipublikasi: 28-07-2025

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PUSKESMAS TINEWATI KECAMATAN SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA

Oleh:

Pipit Pitriani

e-mail: pipitmerchy@gmail.com

Program Magister Ilmu Administrasi Negara

Abstrak

Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Tinewati Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses implementasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan, termasuk petugas kesehatan, kader posyandu, dan masyarakat sasaran. Selain itu, dilakukan juga observasi lapangan dan studi dokumentasi untuk melengkapi data yang diperoleh. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memahami fenomena implementasi kebijakan secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di UPTD Puskesmas Tinewati dapat dijelaskan oleh empat faktor utama, yaitu kebijakan yang diidealkan (*idealized policy*), kelompok sasaran (*target group*), organisasi pelaksana (*implementing organization*), dan faktor lingkungan (*environmental factors*). Kebijakan yang diidealkan memberikan landasan hukum dan pedoman pelaksanaan program. Kelompok sasaran yang jelas dan terdefinisi dengan baik memudahkan dalam penyusunan strategi intervensi. Organisasi pelaksana yang memiliki kapasitas dan komitmen yang kuat menjadi kunci keberhasilan implementasi. Faktor lingkungan, seperti dukungan



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 01, Bulan Juni Tahun 2025

Jurnal Ilmiah Koordinasi

Dikirim penulis: 15-06-2025, Diterima: 29-06-2025 Dipublikasi: 28-07-2025

masyarakat dan ketersediaan sumber daya, juga turut mempengaruhi efektivitas program.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, *stunting*, efektivitas program.

Pendahuluan

Stunting merupakan bentuk kronis dari kekurangan gizi, secara signifikan menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, yang ditandai dengan tinggi badan yang pendek, dimana mencerminkan kekurangan gizi jangka panjang dan infeksi berulang. Berbeda dengan *wasting* (kurus kering), yang mengindikasikan kekurangan gizi akut, dampak *stunting* seringkali tidak dapat dipulihkan, memengaruhi kemampuan kognitif, pencapaian pendidikan, dan produktivitas ekonomi di masa depan. Kondisi ini menciptakan siklus kemiskinan dan kesehatan yang buruk, melanggengkan kerugian lintas generasi. Dampak *stunting* meluas di luar individu, membebani sistem perawatan kesehatan dan menghambat pembangunan nasional.

Akar penyebab *stunting* bersifat multifaset, berasal dari gizi yang tidak memadai selama periode kritis 1.000 hari, yang membentang dari konsepsi hingga ulang tahun kedua anak. Asupan nutrisi penting yang tidak mencukupi, terutama protein, zat besi, seng, dan yodium, memainkan peran penting. Gizi ibu yang buruk sebelum dan selama kehamilan, ditambah dengan akses terbatas ke perawatan prenatal berkualitas, semakin memperburuk risiko. Infeksi yang sering terjadi, seringkali disebabkan oleh sanitasi dan kebersihan yang buruk, mengganggu penyerapan nutrisi dan meningkatkan kebutuhan gizi, berkontribusi pada kegagalan pertumbuhan. Selain itu, faktor sosial ekonomi seperti kemiskinan, kerawanan pangan, dan akses terbatas ke air bersih dan sanitasi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi *stunting*.

Mengatasi *stunting* membutuhkan pendekatan komprehensif dan multi-sektoral. Intervensi harus fokus pada peningkatan gizi ibu, mempromosikan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama, dan memastikan pemberian makanan pendamping yang memadai dan beragam setelah enam bulan. Suplementasi nutrisi, terutama dengan mikronutrien, sangat penting untuk mengatasi kekurangan spesifik. Meningkatkan akses ke air bersih, sanitasi, dan praktik kebersihan



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 01, Bulan Juni Tahun 2025

Jurnal Ilmiah Koordinasi

Dikirim penulis:15-06-2025, Diterima: 29-06-2025 Dipublikasi: 28-07-2025

(WASH) sangat penting untuk mencegah infeksi dan meningkatkan penyerapan nutrisi. Deteksi dini dan penanganan penyakit masa kanak-kanak juga merupakan komponen penting dari strategi pengurangan *stunting* yang berhasil.

Pendidikan memainkan peran penting, terutama dalam memberdayakan perempuan dengan pengetahuan tentang gizi, kebersihan, dan praktik perawatan anak. Program berbasis masyarakat yang mempromosikan perubahan perilaku dan memberikan dukungan kepada keluarga sangat penting untuk dampak yang berkelanjutan. Memperkuat sistem perawatan kesehatan untuk memberikan layanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas juga menjadi prioritas. Selain itu, mengatasi ketahanan pangan melalui pertanian berkelanjutan dan sistem distribusi makanan yang lebih baik dapat meningkatkan akses ke makanan bergizi. Intervensi yang mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan dan keluarga juga dapat meningkatkan gizi.

Peran pemerintah dalam mempercepat pengurangan *stunting* sangat penting. Pemerintah harus memberikan kepemimpinan yang kuat, mengkoordinasikan upaya multi-sektoral, dan mengalokasikan sumber daya yang memadai. Menerapkan kebijakan dan program berbasis bukti sangat penting, termasuk yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak, gizi, WASH, dan perlindungan sosial. Memperkuat sistem informasi kesehatan untuk pemantauan dan evaluasi memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data dan intervensi yang ditargetkan. Memastikan akses yang adil ke layanan, terutama bagi populasi rentan, sangat penting untuk mengatasi kesenjangan.

Inisiatif pemerintah harus memprioritaskan integrasi pengurangan *stunting* ke dalam rencana dan anggaran pembangunan nasional. Kampanye kesadaran publik dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi dan kebersihan. Memperkuat kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan mitra internasional dapat meningkatkan efektivitas intervensi. Investasi dalam penelitian dan inovasi dapat mengarah pada pengembangan strategi yang lebih efektif dan hemat biaya.

Selain itu, pemerintah harus menciptakan lingkungan yang kondusif yang mempromosikan ketahanan pangan dan gizi, termasuk mendukung pertanian berkelanjutan, meningkatkan sistem distribusi makanan, dan menerapkan kebijakan yang mengatasi kemiskinan dan



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 01, Bulan Juni Tahun 2025

Jurnal Ilmiah Koordinasi

Dikirim penulis:15-06-2025, Diterima: 29-06-2025 Dipublikasi: 28-07-2025

ketidaksetaraan. Program perlindungan sosial, seperti transfer tunai dan subsidi makanan, dapat membantu keluarga rentan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pemerintah juga harus memperkuat kerangka peraturan untuk memastikan kualitas dan keamanan produk makanan dan gizi.

Berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah baik dari pusat maupun daerah untuk percepatan *stunting*. Istilah kebijakan sendiri telah banyak dikemukakan oleh para ahli, diantaranya Agustino, L. (2008) memandang kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Ini mencakup proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan publik menurut Agustino, adalah tahap yang sangat krusial, karena pada tahap ini kebijakan tersebut akan di uji, apakah kebijakan tersebut efektif atau tidak.

Dunn, W. N. (2004) menekankan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang saling bergantung yang dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah. Analisis kebijakan publik, menurut Dunn, melibatkan penggunaan berbagai metode untuk memahami dan mengevaluasi kebijakan tersebut. Implementasi dari kebijakan publik menurut Dunn, adalah tahapan yang sangat kompleks, karena melibatkan banyak sekali aktor yang terlibat.

Sementara Islamy, I. (2009) fokus pada prinsip-prinsip yang mendasari perumusan kebijakan negara. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang rasional, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Implementasi kebijakan publik menurut Islamy, harus di dasarkan pada prinsip prinsip yang sudah di rumuskan pada saat perumusan kebijakan tersebut. Sedangkan Subarsono, A. G. (2005) membahas kebijakan publik dari perspektif analisis, dengan menekankan pada konsep, teori, dan aplikasi. Ia menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah hasil dari proses politik yang kompleks. Implementasi kebijakan publik menurut Subarsono, membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan politik.

Wahab, A. S. (2008) memberikan perhatian khusus pada hubungan antara formulasi dan implementasi kebijakan. Ia menekankan bahwa implementasi yang efektif membutuhkan perencanaan yang matang sejak tahap perumusan. Menurut Wahab, implementasi kebijakan publik adalah tahap yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan. selanjutnya Winarno, B. (2002) menjelaskan kebijakan publik sebagai hasil dari



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 01, Bulan Juni Tahun 2025

Jurnal Ilmiah Koordinasi

Dikirim penulis:15-06-2025, Diterima: 29-06-2025 Dipublikasi: 28-07-2025

interaksi antara berbagai aktor dan lembaga dalam masyarakat. Ia menekankan bahwa kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosial. Menurut Winarno, implementasi kebijakan publik melibatkan proses yang dinamis dan seringkali tidak terduga.

Tata kelola dan akuntabilitas yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa upaya pengurangan *stunting* dilaksanakan secara efektif dan efisien, yang melibatkan penguatan pengelolaan keuangan publik, mempromosikan transparansi, dan memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara adil. Penanganan *stunting* memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat untuk memastikan akses terhadap gizi yang baik dan fasilitas kesehatan yang memadai. Dengan adanya sinergi dalam berbagai sektor pemerintahan dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya nutrisi sejak dini, diharapkan angka *stunting* dapat terus menurun hingga mencapai target yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka *stunting* di wilayahnya, yang merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang serius. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah telah meluncurkan program-program intervensi gizi dan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan asupan nutrisi bagi anak-anak dan ibu hamil. Program ini mencakup penyuluhan tentang pentingnya gizi seimbang, distribusi makanan bergizi, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah dan sektor swasta, juga diperkuat untuk memperluas jangkauan program-program tersebut.

Dari beberapa hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Desa Waru Jaya secara umum telah sesuai dengan peraturan, terbukti dengan penurunan angka *stunting* yang signifikan pada tahun 2021. Namun, beberapa aspek masih memerlukan perhatian, yaitu kekurangan tenaga gizi, kurang optimalnya keterlibatan Ketua RT/RW, dan potensi peningkatan anggaran dana desa, sehingga penelitian ini merekomendasikan peningkatan kualitas implementasi kebijakan tersebut agar penurunan *stunting* di Desa Waru Jaya dapat berjalan lebih optimal (Nany Widiastuti, Nany, 2022).



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 01, Bulan Juni Tahun 2025

Jurnal Ilmiah Koordinasi

Dikirim penulis:15-06-2025, Diterima: 29-06-2025 Dipublikasi: 28-07-2025

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Sri Fifi Wahyuni Azis (2023) menunjukkan implementasi Program 1000 HPK yang menunjukkan beberapa aspek positif dan tantangan. Komunikasi yang efektif melalui sosialisasi menjadi kekuatan utama dalam penyampaian informasi program. Namun, terdapat kendala dalam hal pengetahuan SDM dan keterbatasan anggaran yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan. Di sisi lain, keberadaan SOP yang jelas dan komitmen tinggi dari pelaksana program menjadi faktor pendukung keberhasilan, sehingga diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM dan pengelolaan anggaran yang lebih optimal untuk memaksimalkan dampak positif dari pelaksanaan program.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Nugroho, Hardianto Heru (2022) dengan menyoroti upaya Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menangani *stunting* melalui regulasi dan pembentukan tim khusus. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan seperti kurangnya komitmen daerah, program kegiatan, dan anggaran yang memadai. Untuk mengatasi hal ini, penelitian merekomendasikan penguatan koordinasi antar instansi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan konsolidasi sistem pendataan.

Menganalisis pelaksanaan kebijakan tentang percepatan penurunan *stunting* di daerah, khususnya di Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Tinewati Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, sangat penting karena dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai efektivitas program-program yang telah diterapkan untuk mengatasi masalah gizi buruk pada anak. Dengan melakukan analisis ini, pihak berwenang dapat mengevaluasi pencapaian target penurunan *stunting*, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang mungkin ada, serta merumuskan strategi yang lebih tepat dan berbasis data untuk meningkatkan intervensi kesehatan masyarakat. Selain itu, analisis ini juga membantu dalam pengalokasian sumber daya secara lebih efisien dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan terhadap implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayah intervensi Unit Pelaksana



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 01, Bulan Juni Tahun 2025

Jurnal Ilmiah Koordinasi

Dikirim penulis: 15-06-2025, Diterima: 29-06-2025 Dipublikasi: 28-07-2025

Teknis Daerah (UPD) Puskesmas Tinewati Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, menggunakan metode kualitatif untuk menghimpun informasi mendalam tentang efektivitas dan tantangan inisiatif kesehatan ini. Penelitian kualitatif sangat cocok untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks seperti kebijakan kesehatan publik karena memungkinkan peneliti untuk menangkap perspektif bernuansa dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam atau dipengaruhi oleh kebijakan tersebut. Dalam kasus ini, fokusnya adalah pada pemahaman bagaimana petugas kesehatan setempat, anggota masyarakat, dan pembuat kebijakan memandang dan terlibat dalam upaya pengurangan *stunting*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi dan wawancara. Metode observasi memungkinkan peneliti untuk secara langsung mengamati interaksi antara petugas kesehatan dan anggota masyarakat selama kegiatan penjangkauan kesehatan, sehingga memberikan konteks bagi data kuantitatif yang sering dikumpulkan dalam studi kesehatan masyarakat. Selain itu, wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan informan utama seperti penyedia layanan kesehatan, perwakilan masyarakat setempat, dan orang tua dari anak-anak yang mengalami *stunting*. Kombinasi data observasi dan narasi pribadi ini memperkaya pemahaman tentang aspek operasional implementasi kebijakan dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

Analisis data mengikuti pendekatan sistematis yang terdiri dari beberapa langkah: pengumpulan, reduksi, penyajian, dan verifikasi/pengambilan kesimpulan. Pertama, data mentah dari observasi dan wawancara dihimpun. Pengurangan data melibatkan sintesis dan pengkategorian informasi untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang terkait dengan hambatan dan fasilitator dalam penerapan strategi pengurangan *stunting*. Langkah selanjutnya adalah menyajikan data, di mana hasilnya diatur secara visual atau tekstual untuk memudahkan perbandingan dan interpretasi. Terakhir, verifikasi atau pengambilan kesimpulan melibatkan pemeriksaan silang hasil dengan literatur yang ada dan umpan balik pemangku kepentingan untuk memastikan keakuratan dan keandalannya. Proses analisis yang ketat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang efektivitas



penerapan kebijakan pengurangan *stunting* dalam konteks regional khusus ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

UPTD Puskesmas Tinewati Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya memiliki luas wilayah kerja seluruhnya 2.482 Ha, yang terdiri dari lima desa yaitu Cikunten, Sukaherang, Sukaasih, Singasasi, dan Cipakat. Dari ke lima Desa dapat ditempuh dengan kendaraan baik roda dua atau roda empat. Adapun kondisi lingkungan fisik di wilayah kerja UPTD Puskesmas Tinewati terdiri dari : sawah 20,25 %, pemukiman 63,4 %, kebun 10,3 % ladang tanah kering 6,05 %

Situasi kependudukan merujuk pada kondisi demografis suatu wilayah yang dapat dianalisis melalui berbagai indikator, seperti tingkat pertumbuhan penduduk yang menunjukkan seberapa cepat populasi bertambah, angka kelahiran kasar yang mencerminkan jumlah kelahiran per seribu penduduk dalam satu tahun, serta distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur yang memberikan gambaran tentang komposisi demografis. Selain itu, kepadatan penduduk juga menjadi faktor penting yang menunjukkan jumlah penduduk per unit area, sehingga memungkinkan pemahaman lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masyarakat dalam konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berikut adalah tabel tentang jumlah penduduk di wilayah UPTD Puskesmas Tinewati pada tahun 2023:

Tabel 1.

Keadaan Penduduk wilayah UPTD Puskesmas Tinewati
Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk	Persentase
Laki-laki	16.253 jiwa	50%
Perempuan	16.253 jiwa	50%
Jumlah	30.506 jiwa	100%

Sumber: UPTD Puskesmas Tinewati, 2025.



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 01, Bulan Juni Tahun 2025

Jurnal Ilmiah Koordinasi

Dikirim penulis: 15-06-2025, Diterima: 29-06-2025 Dipublikasi: 28-07-2025

Jumlah penduduk di wilayah UPTD Puskesmas Tinewati pada tahun 2023 sebanyak 30.506 jiwa yang terdiri dari penduduk laki laki 16.253 jiwa (50%) penduduk perempuan 16.253 jiwa (50%). Kepadatan penduduk di wilayah kerja UPTD Puskesmas Tinewati tahun 2023 adalah 2.44 jiwa /Km², dengan rata-rata penduduk per rumah 3- 4 jiwa. Derajat kesehatan masyarakat merupakan tingkat kesehatan yang dicapai oleh suatu populasi, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan, perilaku individu, pelayanan kesehatan, dan faktor genetik.

Tenaga kesehatan di tingkat Puskesmas bertanggung jawab untuk diagnosis, pengobatan, dan perawatan pasien, sementara tenaga administrasi memastikan bahwa sistem pelayanan kesehatan berjalan dengan lancar melalui pengelolaan data pasien, penjadwalan layanan, dan koordinasi antar departemen. Tanpa adanya kolaborasi yang baik antara kedua kelompok ini, kualitas pelayanan kesehatan dapat menurun, yang berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam penanganan pasien dan mengurangi kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Selain itu, ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai juga berperan penting dalam meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan di daerah terpencil atau kurang terlayani, sehingga investasi dalam pelatihan dan rekrutmen tenaga kesehatan serta administrasi adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Adapun sarana pelayanan kesehatan lain yaitu Posyandu. Posyandu adalah pos pelayanan terpadu yang merupakan milik masyarakat, petugas kesehatan pada dasarnya hanya membantu penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Posyandu. Jumlah Posyandu yang ada di wilayah kerja Puskesmas Tinewati 40 buah Posyandu, dengan tingkat Mandiri dan 5 desa siaga aktif.

B. Pembahasan

Kebijakan yang diidealkan untuk percepatan penurunan *stunting* di Wilayah Kerja UPTD Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, bertujuan untuk mengurangi angka *stunting* melalui pendekatan multisektoral yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kebijakan ini berlandaskan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 dan mencakup strategi komprehensif untuk meningkatkan gizi ibu hamil dan anak-anak serta memperbaiki akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 01, Bulan Juni Tahun 2025

Jurnal Ilmiah Koordinasi

Dikirim penulis:15-06-2025, Diterima: 29-06-2025 Dipublikasi: 28-07-2025

Implementasi kebijakan ini memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak untuk memastikan bahwa semua elemen dari kebijakan yang diidealkan dapat terwujud secara efektif. Dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di wilayah kerja UPTD Puskesmas Tinewati Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi pada anak, yang berkontribusi pada masalah *stunting*.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak merupakan langkah penting dalam percepatan penurunan *stunting*. Dalam hal ini, koordinasi dengan lembaga terkait sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan dapat berjalan efektif. Berbagai program edukasi dan penyuluhan telah dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai gizi seimbang, pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin bagi ibu hamil, serta pemantauan pertumbuhan anak.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam upaya ini cukup signifikan, termasuk kemampuan ekonomi masyarakat yang terbatas dan kebiasaan pola makan yang kurang seimbang. Dalam rangka mendukung implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting*, koordinasi antara UPTD Puskesmas Tinewati dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas setempat menjadi penting. Melalui sinergi ini, berbagai program intervensi gizi dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan angka *stunting* di Kecamatan Singaparna dapat menurun secara signifikan. Keberhasilan dalam upaya ini tidak hanya bergantung pada tindakan langsung tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip gizi yang baik. Kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *stunting* di UPTD Puskesmas Tinewati Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya mencakup anak-anak balita, ibu hamil, serta keluarga yang berisiko mengalami *stunting*.

Identifikasi kelompok sasaran ini sangat penting sebagai pihak yang paling langsung terpengaruh oleh program-program intervensi gizi dan kesehatan yang dirancang untuk mengurangi prevalensi *stunting*. Dengan memahami karakteristik demografis, sosial, dan ekonomi dari kelompok ini, kebijakan dapat disusun dengan lebih tepat sasaran



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 01, Bulan Juni Tahun 2025

Jurnal Ilmiah Koordinasi

Dikirim penulis:15-06-2025, Diterima: 29-06-2025 Dipublikasi: 28-07-2025

sehingga dapat memenuhi kebutuhannya. Kondisi kesehatan ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Tinewati menjadi perhatian utama karena banyaknya ibu hamil yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Hal tersebut di atas dapat berakibat serius pada kesehatan janin dan bayi, mengingat bahwa periode kehamilan adalah waktu kritis untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Pelayanan kesehatan yang kurang optimal dapat menyebabkan komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan, serta meningkatkan risiko *stunting* pada bayi. Sehingga penting untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi yang baik untuk mendukung pertumbuhan anak.

Kondisi balita di wilayah kerja Puskesmas Tinewati menunjukkan angka *stunting* yang cukup tinggi, yang merupakan indikasi dari kekurangan gizi kronis. *Stunting* terjadi ketika anak tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup selama periode penting dalam pertumbuhannya, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Hal tersebut diperparah oleh pelayanan kesehatan yang tidak memadai, termasuk kurangnya akses terhadap pemeriksaan kesehatan rutin dan edukasi tentang nutrisi.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan serta memberikan informasi yang tepat mengenai pentingnya pemenuhan gizi bagi balita. Kondisi keluarga balita di wilayah kerja Puskesmas Tinewati menunjukkan keragaman yang signifikan, terutama dalam aspek ekonomi. Beberapa keluarga menghadapi keterbatasan finansial yang mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya.

Dalam konteks ini, pentingnya edukasi mengenai pemenuhan gizi tidak dapat diabaikan. Edukasi ini mencakup pengetahuan tentang pentingnya asupan gizi seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, serta cara-cara praktis untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Dengan memberikan bimbingan kepada keluarga, diharapkan dapat lebih memahami bagaimana mengelola sumber daya yang ada untuk memastikan anak-anaknya mendapatkan nutrisi yang cukup.



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 01, Bulan Juni Tahun 2025

Jurnal Ilmiah Koordinasi

Dikirim penulis:15-06-2025, Diterima: 29-06-2025 Dipublikasi: 28-07-2025

Pencapaian keberhasilan dalam percepatan penurunan *stunting* di wilayah kerja UPTD Puskesmas Tinewati Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya sangat dipengaruhi oleh upaya kolaboratif antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Program-program intervensi yang berfokus pada peningkatan gizi dan akses layanan kesehatan telah dilaksanakan dengan baik, namun tantangan tetap ada terutama terkait dengan kondisi ekonomi keluarga.

Dengan adanya edukasi yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan angka *stunting* dapat menurun secara signifikan. Melalui pendekatan menyeluruh yang melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk keluarga balita itu sendiri, pencapaian target penurunan *stunting* bisa lebih terjamin. Implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di wilayah kerja UPTD Puskesmas Tinewati Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya telah menunjukkan kemajuan signifikan.

Melalui program-program edukasi dan pelayanan kesehatan, masyarakat diharapkan lebih memahami pentingnya asupan gizi seimbang bagi pertumbuhan anak-anaknya. Selain itu, peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak juga menjadi fokus utama, karena kesehatan ibu yang baik sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan gizi anak. Namun, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan percepatan penurunan *stunting* secara optimal.

Dukungan teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya sangat diperlukan untuk memperkuat kapasitas implementasi kebijakan yang ada, hal tersebut mencakup pelatihan bagi tenaga kesehatan, pengembangan program intervensi gizi yang lebih efektif, serta penguatan sistem pemantauan dan evaluasi. Dengan dukungan tersebut, UPTD Puskesmas Tinewati dapat lebih maksimal dalam menjalankan program-programnya, sehingga pencapaian keberhasilan dalam penurunan *stunting* dapat terwujud dengan lebih cepat dan berkelanjutan.

Kegiatan lapangan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi pada anak serta pelayanan kesehatan ibu dan anak merupakan langkah strategis dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di wilayah kerja UPTD Puskesmas Tinewati. Adapun kebiasaan pola makan yang tidak seimbang sering kali disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang nutrisi serta keterbatasan akses terhadap makanan bergizi, sehingga



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 01, Bulan Juni Tahun 2025

Jurnal Ilmiah Koordinasi

Dikirim penulis:15-06-2025, Diterima: 29-06-2025 Dipublikasi: 28-07-2025

selain melakukan kegiatan edukasi tentang pentingnya gizi, perlu ada program-program pendukung yang dapat membantu meningkatkan perekonomian setempat serta aksesibilitas terhadap bahan makanan sehat. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi pada anak, kolaborasi antara UPTD Puskesmas Tinewati dan berbagai pihak telah menunjukkan hasil yang positif.

Program-program edukasi yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang tua tentang nutrisi yang tepat bagi anak-anaknya, serta pentingnya kesehatan ibu selama kehamilan dan menyusui. Dengan adanya peningkatan pengetahuan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dampak dari *stunting* dan berkontribusi dalam pencegahannya. Selain itu, pelayanan kesehatan ibu dan anak juga ditingkatkan melalui pemeriksaan rutin dan penyuluhan kesehatan, yang merupakan langkah penting dalam menurunkan angka *stunting* di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Tinewati Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

Faktor lingkungan, termasuk kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, sangat penting dalam menentukan keberhasilan program percepatan penurunan *stunting* di wilayah kerja UPTD Puskesmas Tinewati Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Kondisi politik yang stabil dan dukungan dari pemerintah daerah dapat memperlancar proses implementasi kebijakan, sedangkan ketidakstabilan politik atau kurangnya dukungan dari pemangku kepentingan dapat menghambat upaya penurunan *stunting*.

Faktor ekonomi juga berperan besar dalam keberhasilan program percepatan penurunan *stunting*. Ketersediaan anggaran yang memadai untuk program-program kesehatan dan gizi sangat penting agar intervensi yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Di sisi lain, kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat juga harus dipertimbangkan, seperti pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan pola makan sehat akan mempengaruhi partisipasinya dalam program-program pencegahan *stunting*.

Pengelolaan faktor lingkungan menjadi bagian integral dari perencanaan dan implementasi kebijakan untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting*, penting bagi UPTD



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 01, Bulan Juni Tahun 2025

Jurnal Ilmiah Koordinasi

Dikirim penulis:15-06-2025, Diterima: 29-06-2025 Dipublikasi: 28-07-2025

Puskesmas Tinewati untuk melakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor eksternal ini. Dengan memahami dinamika lingkungan yang ada, pihak-pihak terkait dapat merumuskan strategi yang lebih tepat sasaran serta melibatkan masyarakat dalam setiap tahap implementasi kebijakan.

Hasil wawancara dengan beberapa pihak, termasuk Kepala Puskesmas Tinewati, Camat Singaparna, Bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan Puskesmas Tinewati, menunjukkan bahwa aspek budaya masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tinewati memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan dan pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting*. Kebiasaan pola makan yang kurang baik, seperti konsumsi makanan yang rendah gizi dan ketidakpahaman tentang pentingnya nutrisi seimbang, menjadi tantangan utama dalam upaya ini.

Dukungan teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya sangat diperlukan untuk memperkuat kapasitas implementasi kebijakan yang ada, hal tersebut mencakup pelatihan bagi tenaga kesehatan, pengembangan program intervensi gizi yang lebih efektif, serta penguatan sistem pemantauan dan evaluasi. Dengan dukungan tersebut, UPTD Puskesmas Tinewati dapat lebih maksimal dalam menjalankan program-programnya, sehingga pencapaian keberhasilan dalam penurunan *stunting* dapat terwujud dengan lebih cepat dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berfokus pada pendekatan multisektoral yang melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan gizi ibu hamil dan anak-anak, serta memperbaiki akses layanan kesehatan dan pendidikan. Meskipun program intervensi gizi dan edukasi telah dilakukan, tantangan utama terletak pada kurangnya kesadaran masyarakat dan kondisi ekonomi yang terbatas, sehingga koordinasi yang kuat antara pemerintah, tenaga kesehatan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan mencapai penurunan angka *stunting* yang signifikan melalui perubahan perilaku masyarakat dan peningkatan gizi yang berkelanjutan.



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 01, Bulan Juni Tahun 2025

Jurnal Ilmiah Koordinasi

Dikirim penulis:15-06-2025, Diterima: 29-06-2025 Dipublikasi: 28-07-2025

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Andi Sri Fifi Wahyuni Azis (2023). *Analisis Implementasi Kebijakan Program 1000 Hari Pertama Kehidupan Dalam Penanggulangan Stunting di Kabupaten Maros*. Program Magister Universitas Hasanuddin,
- Dunn, W. N. (2004). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UGM Press.
- Islamy, I. (2009). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Sinar Grafika.
- Nany Widiastuti, Nany (2022). *Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Di Desa Waru Jaya Kabupaten Bogor*. Program Pascasarjana, Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Nugroho, Hardianto Heru (2022). *Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kabupaten Bandung Tahun 2021*. Program Pascasarjana, Universitas Nasional.
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Wahab, A. S. (2008). *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2002). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Presindo.